Jurnal TEKNOSIA
Vol. 15 No. 2, bulan Desember, Hal: 1 – 9
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/teknosia
ISSN 2798-0588 (Online) dan ISSN 1978-8819 (Print)

ISSN 1978-8819 (Print)
ISSN 2798-0588 (Online)
TEKNOSIA
Jurnal Ilmiah Bidang Sains - Teknologi
Murni Disiplin dan Antar Disiplin

IDENTIFIKASI TINGKAT KEKUKUMUHAN KAWASAN PEMUKIMAN TERATAK BULUH KABUPATEN KAMPAR

Mashuri[1]
Dosen, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Riau
E-mail: Mashuri@lecturer.unri.ac.id

Informasi Naskah:
Diterima:
1 April 2021
Diterbitkan:
20 Desember 2021

Abstract: The complex of activities and economic in urban areas become society attractiveness to migrate which has an impact on urban intensity. Uncontrollable development in an area will hurt the appearance of urban areas. One of the negative impacts is an urban slum area that can decrease image and live comfortably. Teratak Buluh, is a border of Pekanbaru city, becoming a gateway of Riau Province capital, and has strategic positioning as the main cross in Sumatera transportation way. However, the advantages are not followed a good arrangement policy, so that this area becomes slum area with 15,7 Ha. This research aim is to identify environmental condition and level of slum area with quantitative and qualitative analysis method. Research variable refers to ordinance of PUPR no 2 in 2016 about quality increasing of housing and settlement slum such as building condition, neighborhood path condition, drinking water supply conditions, environmental drainage conditions, wastewater treatment conditions, conditions solid waste treatment, and fire protection conditions. The result of this research show identification of the Teratak Buluh slum area level is the light slum category. The highest percentage or main problem for this slum area is fire protection conditions and conditions solid waste treatment low.

Keyword: *Identification, slum level, Teratak Buluh Area*

Abstrak: Kompleksitas kegiatan dan perekonomian di kawasan perkotaan menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan migrasi yang berdampak terhadap intensitas perkotaan. Perkembangan yang tidak terkendali pada suatu kawasan akan menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap tampilan kawasan perkotaan. Salah satu dampak negatif adalah munculnya kawasan pemukiman kumuh yang dapat menurunkan citra dan tidak layak huni. Kawasan Teratak Buluh adalah suatu kawasan berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru sehingga menjadi gerbang ibukota Provinsi Riau dan memiliki posisi startegis sebagai jalur lintas antar Provinsi Sumatera. Kelebihan tersebut tidak diikuti dengan penataan kawasan dengan baik, sehingga kawasan ini menjadi kawasan kumuh perkotaan dengan luas 15.7 Ha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan dan tingkat kekumuhan kawasan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seperti kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi tingkat kekumuhan kawasan Teratak Buluh pada kategori kumuh ringan. Presentase tertinggi atau masalah utama kekumuhan pada kawasan ini adalah rendahnya aspek kondisi proteksi kebakaran dan kondisi pengelolaan persampahan.
Kata Kunci: Identifikasi, tingkat kekumuhan, Kawasan Teratak Buluh

PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan tidak lepas dari ketertarikan masyarakat yang ingin berdomisi akibat dari kompleksitasnya kegiatan didalam kota. Dengan adanya kompleksitas kegiatan tersebut, tentunya kawasan kota menjadi daya tarik aktivitas perekonomian, sehingga dengan keberadaan daya tarik ekonomi tersebut menciptakan kegiatan migrasi diwilayah perkotaan. Selain itu, kegiatan migrasi/arus urbanisasi di dalam kota juga dipicu akibat tidak berimbangnya antara pembangunan kota dan desa. Dampak dari aktivitas arus urbanisasi tersebut berpengaruh terhadap intensitas perkotaan.

Perkembangan kawasan kota yang tidak tertata, telah menciptakan dampak permasalahan didalam kota. Permasalahan yang muncul diantaranya adalah terciptanya pemukiman kumuh dan berefek terhadap menurunnya citra kawasan perkotaan. Kondisi ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat untuk tinggal dikawasan tersebut. Permasalahan pemukiman kumuh merupakan suatu isu penting yang perlu ditangani dan dituntaskan permasalahannya. Sehingga, kegiatan penanganan pemukiman kumuh dalam RPJM Nasional 2020-2024 termasuk menjadi bagian program dan kegiatan prioritas yang perlu dilakasanakan untuk percepatan penyelesaian permasalahan pemukiman kumuh. Secara struktural kewenangan penanganannya, pemerintah daerah tentunya memiliki peran utama bersama dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan pemukiman kumuh dan akademisi sebagai lembaga pendidikan diharapkan memberikan sumbangsih terkait solusi dan penyelesaiannya.

Penelitian ini fokus pada kawasan pemukiman kumuh berdasarkan penetapan kawasan kumuh perkotaan SK Bupati Kampar Nomor 650/ BAPPEDA-KIMP/ 2016/ 100 tanggal 3 Oktober 2016 dengan luas ± 15.57 Ha. Lokasi kawasan terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kawasan ini merupakan salah satu Kota Satelit Pekanbaru yang dilintasi oleh Jalan Lintas Tengah Sumatera. Secara geografis, kawasan ini memiliki posisi strategis yang memiliki fungsi sebagai pintu gerbang selatan Kota Pekanbaru dalam kontek sistem perkotaan metropolitan. Maka, kawasan ini menjadi bagian dari wajah Kota Pekanbaru yang perlu ditata untuk menciptakan citra kota yang baik.

Indentifikasi kawasan kumuh merupakan proses awal yang dilakukan sebelum dilakukan penanganan tahap berikutnya. Pentingnya tahap ini dilakukan bertujuan untuk menentukan tingkat kekumuhan dan menghasilkan gambaran kondisi permasalahan di kawasan yang akan diteliti. Hasil dari kajian identifikasi kawasan pemukiman kumuh menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan proses langkah tahap berikutnya. Maka, proses indentifikasi terhadap kawasan pemukiman kumuh sangat penting untuk dilakukan sebagai proses tahap awal dalam hal kegiatan penanganan Pemukiman Kumuh Kawasan Teratak Buluh.

TINJUAN PUSTAKA

Dalam undang – undang Nomor 1 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan pengertian permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria pemukiman kumuh yang tertuang dalam Permen PUPR No 02/PRT/M/2016 menjelaskan terkait kondisi kekumuhan pada kawasan meliputi tujuh aspek yaitu: bangunan gedung, jalan lingkungan,

penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Dari tujuh aspek tersebut, dipecah menjadi 19 kriteria kumuh. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan aspek dan kriteria kumuh kawasan pemukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. *Aspek dan kriteria penilaian kumuh*

No	Aspek	Kriteria Kumuh
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan b. Tingkat Kepadatan Bangunan c. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air b. Ketidaktersediaan Drainase c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan d. Tidak terpeliharanya Drainasee. e. Kualitas Konstruksi Drainase
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis
6	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sumber : Kementerian PUPR, 2016

Penilaian terhadap kriteria kumuh dihasilkan berdasarkan kondisi dan permasalahan kawasan pemukiman. Tingkatan kumuh kawasan diidentifikasi, sehingga menghasilkan tingkatan kumuh kawasan. Adapun klasifikasi tingkatan pemukiman kumuh adalah: ringan, sedang; dan berat.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan dan tingkat kekumuhan Kawasan Pemukiman Teratak Buluh. Metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data-data yang dapat diukur dengan jelas yaitu berupa angka-angka/ numerik terkait data luasan delineasi kawasan terdampak kumuh, jumlah penduduk dan kriteria kekumuhan dalam kawasan penelitian. Pengolahan data hasil indetifikasi lapangan diolah dengan metode sederhana untuk menentukan tingkat kekumuhan kawasan.

Dalam menentukan variabel penelitian mengacu pada Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang diatur dalam Permen PU tersebut terdiri dari tujuh aspek yaitu: kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Dari tujuh aspek tersebut terbagi lagi menjadi sembilan belas kriteria kumuh yang nantinya akan dilakukan penilain berdasarkan kondisi

permasalahan kawasan.

Pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan observasi lapangan, sedangkan survey data sekunder berupa data kebijakan dilakukan di instansi pemerintah terkait. Populasi penelitian adalah semua objek yang menjadi kriteria kumuh yang berada dalam delineasi kawasan pemukiman kumuh Teratak Buluh Kabupaten Kampar.

Untuk mendapatkan klasifikasi tingkat kekumuhan kawasan penelitian dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kompleksitas permasalahan di setiap variabel. Didalam variable terdapat kriteria dan indikator yang diuraikan dengan metode kualitatif deskriptif dan didukung dengan metode kuantitatif dengan cara melakukan skoring. Dari hasil skoring tersebut akan dihasilkan kesimpulan terkait dengan tingkatan kumuh dan kompleksitas permasalahan kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kawasan Pemukiman Kumuh Aspek Kondisi Bangunan

Analisis tingkat kekumuhan Kawasan Pemukiman Kumuh Teratak Buluh berdasarkan aspek bangunan gedung di kawasan penelitian terdiri dari tiga kriteria kumuh yaitu ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Kondisi tingkat ketidakteraturan bangunan dari data hasil survey lapangan di kawasan penelitian yaitu: bangunan yang melanggar aturan sempa dan sungai, terdapat bangunan yang dibangun diatas jaringan drainase utama, besaran bangunan yang tidak sesuai standar dan orientasi bangunan yang membelakangi sungai. Maka, setelah didata jumlah bangunan yang memiliki kriteria ketidakteraturan bangunan adalah 62 unit rumah atau 26 persen.

Penilaian tingkat kepadatan bangunan dibedakan oleh besar kecilnya sebuah kota. Kawasan penelitian merupakan kawasan penyangga Kota Pekanbaru termasuk kategori kota kecil, ketentuan kepadatan tinggi untuk kota kecil adalah >200 unit/Ha. Dari hasil survey data lapangan dan analisis menggunakan peta, dikawasan penelitian memiliki beberapa area yang termasuk dalam kategori kepadatan tinggi. Hasil analisis perhitungan dan pemetaan di kawasan penelitian termasuk dalam kategori tingkat kepadatan bangunan terdapat 72 unit bangunan termasuk dalam kategori padat dengan presentase 26%.

Gambar 1. *Kondisi kepadatan bangunan (Sumber: Penulis, 2021)*

Sedangkan penilaian terkait kriteria tingkat ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan dikawasan penelitian memiliki permasalahan berupa kondisi bangunan kurang layak huni sehingga tidak memiliki fungsi keselamatan, nyaman dan kesehatan yang layak untuk dihuni. Hasil data survey lapangan menunjukkan bahwa terdapat 63 unit atau 21% terkait dengan kriteria permasalahan kumuh ini.

Gambar 2. *Kondisi Bangunan Tidak Layak Huni (Sumber: Penulis, 2021)*

Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

Penelitian tingkat kekumuhan kawasan pemukiman terkait dengan aspek kondisi jalan lingkungan, memiliki

dua kriteria kumuh yaitu cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Dua kriteria ini dilihat dari sisi panjang jalan lingkungan yang mengalami permasalahan dilapangan.

Hasil penelitian lapangan terkait dengan cakupan pelayanan jalan lingkungan, dikawasan penelitian masih terdapat jalan lingkungan yang belum terbangun. Jalan yang belum terbangun atau kondisi jalan berupa tanah memiliki panjang 188 meter atau 5% dari total panjang jalan.

Terkait dengan penelitian kualitas permukaan jalan lingkungan, penilaian tingkat kekumuhan dilihat dari panjang jalan panjang jalan lingkungan dengan kualitas permukaan jalan yang buruk dan rusak. Dari hasil survey pengukuran dilapangan, panjang jalan yang memiliki kualitas buruk dikawasan ini yaitu sepanjang 1168 meter atau sebesar 30% dari total panjang jalan lingkungan kawasan.

Gambar 3. *Kondisi Jalan Lingkungan (Sumber: Penulis, 2021)*

Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum

Analisis untuk menentukan kondisi tingkat kekumuhan dari aspek penyediaan air minum di kawasan penelitian terdiri dari dua kriteria yaitu ketidaktersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimal.

Kriteria ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak bisa mengakses air minum dengan kualitas tidak berwarna, tidak memiliki bau dan tidak berasa. Saat ini, sumber air minum di kawasan penelitian terdiri dari dua sumber yaitu PDAM dan air sumur. Pelayanan dan jaringan perpipaan PDAM dikawasan penelitian hanya di area sepanjang jalan utama kawasan. Sehingga diluar pelayanan PDAM tersebut sumber air minum yaitu dari sumur memiliki kualitas sumber air minum yang aman dan tidak aman. Kualitas air minum yang tidak aman berupa air sumur yang berwarna dan sebagian berminyak. Dari hasil survey, populasi masyarakat yang kawasan penelitian yang mengakses kualitas tidak aman yaitu sebanyak 65 rumah tangga atau 25%.

Untuk populasi masyarakat yang tidak terpenuhinya kebutuhan air minum minimal dikawasan penelitian yaitu 20 rumah tangga atau 8%.

Gambar 4. *Kondisi Air Minum (Sumber: Penulis, 2021)*

Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

Identifikasi untuk menentukan kondisi tingkat kekumuhan dari aspek drainase lingkungan di kawasan penelitian memiliki 5 kriteria yaitu: kriteria kumuh ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidaktersediaan drainase, ketidakhubungan dengan sistem drainase perkotaan, tidak terpeliharanya drainase dan kualitas konstruksi drainase.

Hasil penelitian terkait dengan kriteria kumuh ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, dikawasan perencanaan terdapat area yang memiliki genangan banjir atau area yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan. Dampaknya yaitu terjadi genangan, ketinggian genangan

bervariasi ada yang 30cm dan ada juga yang mencapai 60 cm. Area yang dikategorikan tidak mampu mengalirkan air/ banjir dengan luasan lebih kurang 3.9 hektar atau 25% dari total luas wilayah. Area banjir ini terjadi akibat drainase yang mengecil dibagian hulu drainase utama, hal ini disebabkan oleh pembangunan hunian yang menggunakan badan sungai/ drainase utama sebagai pemukiman.

Hasil penelitian terkait kriteria kumuh ketidaktersediaan drainase lingkungan permukiman, masih terdapat jalan yang belum memiliki drainase dikawasan tersebut. Panjang jalan yang tidak memiliki drainase yaitu 1330 meter atau 28% dari panjang drainase.

Terkait dengan kondisi drainase ketidak terhubungan dengan sistem perkotaan, masih terdapat area-area kawasan yang belum memiliki koneksi jaringan drainase/ terputus. Berdasarkan hasil survey dan pengukuran dengan peta, luas area yang memiliki drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki diatasnya yaitu 3.5 hektar atau 35% dari total luas kawasan.

Kriteria kumuh tidak terpeliharanya dranase lingkungan berdasarkan survey lapangan, sepanjang 730 atau 40 meter memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat memelihara saluran sehingga dipenuhi oleh sampah dan lumpur.

Untuk kriteria kualitas konstruksi drainase, dikawasan penelitian terdapat panjang drainase lingkungan yang memiliki kualitas konstruksi buruk yaitu sepanjang 440 meter atau 26% dari panjang drainase keseluruhan. Dari sepanjang drainase tersebut kondisi drainase terdiri dari drainase rusak ringan, sedang dan berat.

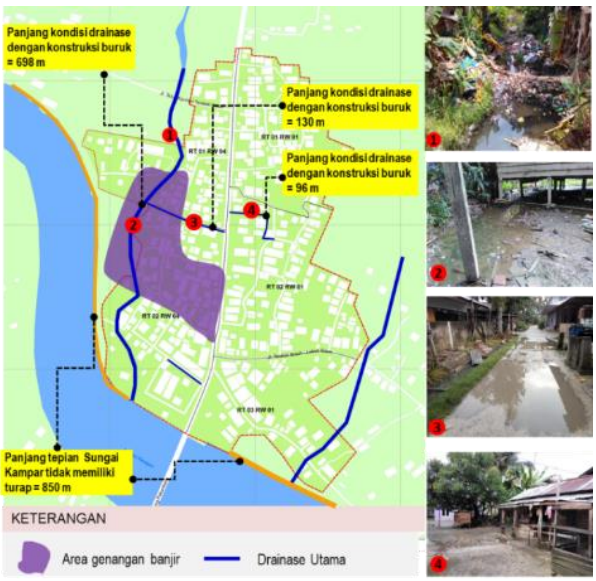

Gambar 5. *Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air (Sumber: Penulis, 2021)*

Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kumuh yang digunakan untuk mengetahui kondisi dari aspek pengelolaan air limbah yaitu sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis dan prasarana atau sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis di kawasan pemukiman.

Hasil survey terkait dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis yaitu mayoritas rumah tangga memiliki kloset/kakus yang terhubung dengan tangki septiktank. Pada umumnya tangki septiktank yang ada dalam bentuk individual. Namun, juga terdapat permasalahan yaitu sejumlah 36 rumah tangga atau 14% total rumah tangga di kawasan dengan sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis.

Kriteria kumuh prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai, dikawasan penelitian mayoritas rumah tangga memiliki kloset leher angsa yang terhubung septiktank. Dikawasan juga terdapat 1 unit ipal komunal yang digunakan untuk mengolah limbah dikawasan pemukiman padat. Terkait dengan kriteria prasarana dan sarana ini tentunya juga memiliki permasalahan yaitu 40 rumah tangga atau 16% tidak memenuhi persyaratan teknis.

Aspek Kondisi Pengelolaan Sampah

Identifikasi untuk menentukan kondisi tingkat kekumuhan dari aspek pengelolaan sampah di kawasan penelitian yaitu berupa kriteria prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.

Kondisi prasarana dan sarana persampahan di lokasi penelitian saat ini dengan fasilitas persampahan yang kurang memadai yaitu: belum memiliki tempat sampah dengan pemilahan, gerobak sampah atau sarana pengangkutan dan TPS 3R. Sarana yang ada saat ini yaitu TPS yang kurang memadai berlokasi di area dekat pasar. Dampak dari terbatasnya sarana persampahan dapat dilihat dengan terjadinya penumpukan sampah di tepi jalan, tepian sungai dan drainase. Dengan demikian dari hasil survey dan pengukuran peta, area pemukiman yang memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu 13,3 hektar atau 86%.

Kondisi terkait dengan sistem pengelolaaan persampahan, pada umumnya sampah yang ada dikawasan ini dikelola dengan cara membakar, menimbun dan ada juga masyarakat yang membuang sampah ke drainase dan sungai. Kondisi saat ini sampah yang diangkut melalui truk sampah dikawasan hanya sebagian saja yaitu dilokasi area pasar. Dari hasil survey dan pengukuran dengan peta, luas area kawasan pemukiman yang memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar adalah 13,3 hektar atau 86%.

Terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, kondisinya saat pada area yang memiliki sarana sampah 60% kondisinya tidak terpelihara sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan persampahan.

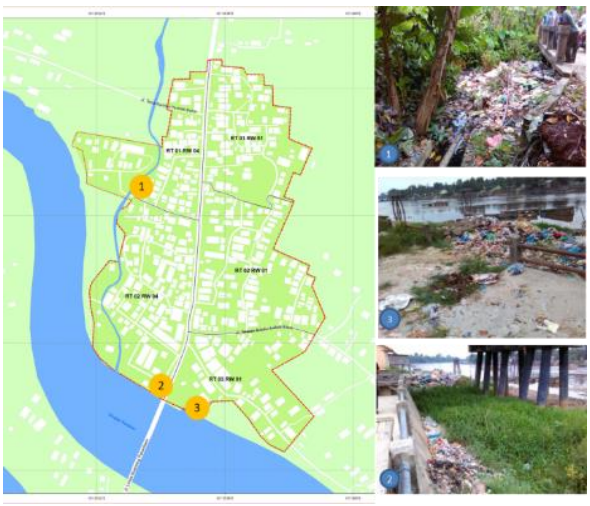

Gambar 6. *Pengelolaan Persampahan (Sumber: Penulis, 2021)*

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Identifikasi untuk menentukan kondisi tingkat kekumuhan dari kriteria proteksi kebakaran di kawasan penelitian yaitu berupa indikator yaitu prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis.

Kondisi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran di kawasan penelitian yaitu terkait dengan pasokan air, akses jalan lingkungan pemukiman kurang dari 3,5 meter, sarana komunikasi, data sistem proteksi kebakaran lingkungan dan ketersediaan bangunan pos pemadam kebakaran yang dekat dengan kawasan. Dilihat indikator tersebut, maka luas area kawasan yang tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran adalah 15,6 Ha atau 100% dari total luas kawasan.

Terkait dengan kondisi ketersediaan sarana proteksi kebakaran dikawasan penelitian juga tidak ada. Maka luas area pemukiman yang tidak memiliki sarana proteksi kebakaran adalah 15,6 Ha atau 100% dari total luas kawasan.

Gambar 7. *Kondisi Jalan dengan lebar kurang dari 3,5 m (Sumber: Penulis, 2021)*

Tingkat Kekumuhan Kawasan

Analisis tingkat kekumuhan kawasan bertujuan untuk menentukan jenis kumuh suatu kawasan pemukiman. Parameter penilaian ditiap-tiap kriteria kumuh terbagi menjadi 3 tingkatan.

Tabel 2. *Parameter penilaian di tiap-tiap kriteria kumuh*

Kriteria Kumuh	Parameter Penilaian	Nilai
19 Kriteria kumuh	25%-50% mengalami permasalahan berdasarkan kriteria kumuh	1
	51%-75% mengalami permasalahan berdasarkan kriteria kumuh	3
	76%-100% mengalami permasalahan berdasarkan kriteria kumuh	5

Sumber : Kementrian PUPR, 2016

Tabel 3. *Penilaian / scoring tingkat kumuh Kawasan Pemukiman Teratak Buluh*

No.	Aspek	Kriteria	Prosentase	Nilai
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	26	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	26	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	21	-
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	5	-
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	30	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	25	1
		b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	8	-
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	25	1
		b. Ketidaktersediaan Drainase	28	1
		c. Ketidakhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	35	1
		d. Tidak terpeliharanya Drainase	26	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	33	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14	-
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	16	-
6.	Kondisi Pengelolaan Sampah	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	86	5
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis	86	5
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	60	3
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	100	5
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100	5
Jumlah				32

Sumber: Penulis, 2021

Tingkatan kumuh kawasan terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu: berat, sedang dan ringan. Ketentuan ditiap-tiap tingkatan kumuh berdasarkan hasil total jumlah nilai/scoring dari 19 kriteria kumuh yaitu:

a. Kumuh berat bila memiliki nilai 71-95
b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 45 -70
c. Kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44

Dari tabel penilaian tingkat kekumuhan kawasan, jumlah nilai/scoring Kawasan Pemukiman Teratak Buluh adalah 32. Maka, tingkatan kumuh kawasan penelitian adalah kumuh ringan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kawasan Pemukiman Teratak Buluh termasuk dalam kategori tingkatan kumuh ringan. Presentase tertinggi terkait dengan permasalahan kumuh kawasan adalah kondisi minim atau rendahnya fasilitas sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan kurang optimalnya pengelolaan persampahan berupa terbatasnya fasilitas sarana dan persampahan, kondisi pengelolaan yang tidak baik serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan yang ada. Sedangkan permasalahan pada aspek lainnya terkait dengan kriteria kumuh yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase dan air limbah memperoleh hasil penilaian dengan presentase rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Farida, Rina. (2016). Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh perkotaan. Jakarta: Kementrian PUPR.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

Perda Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019 – 2039. Bangkinang: Pemerintah Kabupaten Kampar.

Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Riau.

Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Jakarta: Kementrian PUPR.

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.

SK Bupati Kampar Nomor 650/ BAPPEDA-KIMP/ 2016 Tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kabupaten Kampar.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.